

Paradoks Pembangunan Gender: Dampak pada Ketimpangan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi di Indonesia

The Gender Development Paradox: Impact on Access Disparities in Education, Health, and Economy in Indonesia

Arvian Taniar Effendi¹, Grace Bintang Debora Marpaung²

^{1,2} Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Penulis Korespondensi

Arvian Taniar Effendi
arvian_4121230193@pknstan.ac.id

Histori Artikel

Diajukan: 24 Oktober 2025
Revisi Akhir: 17 Desember 2025
Disetujui: 20 Desember 2025
Terbit: 31 Desember 2025

Abstrak

Dibalik komitmen kebijakan kesetaraan gender di Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan paradoks berupa kesenjangan yang persisten. Terdapat kelangkaan analisis kuantitatif mengenai konsekuensi dari ketidaksetaraan sistemik ini terhadap dimensi pembangunan lain di tingkat sub-nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap ketimpangan di sektor pendidikan (Gender Parity Index), kesehatan (Rasio Angka Harapan Hidup), dan ekonomi (Rasio Gini). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel (REM dan FEM) terhadap data 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan IPG berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan paritas gender di pendidikan dan memperlebar rasio harapan hidup perempuan. Namun, ditemukan sebuah paradoks di mana peningkatan IPG justru secara signifikan meningkatkan ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Sementara itu, IKG tidak ditemukan berpengaruh signifikan pada ketiga variabel dependen. Kesimpulannya, pembangunan gender berfungsi sebagai faktor konversi positif untuk kapabilitas sosial, tetapi gagal terkonversi secara merata di sektor ekonomi, mengindikasikan kemajuan yang bersifat bertingkat (stratified) yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan ekonomi.

Kata Kunci

Indeks Pembangunan Gender; Indeks Ketimpangan Gender; Rasio Gini; Paritas Gender Pendidikan; Akses Kesehatan

Abstract

Behind Indonesia's policy commitments to gender equality, the on-the-ground reality reveals a paradox of persistent gaps. There is a scarcity of quantitative analysis regarding the consequences of this systemic inequality on other development dimensions at the sub-national level. This study aims to analyze the influence of the Gender Development Index (GDI) and the Gender Inequality Index (GII) on inequality in the education sector (Gender Parity Index), health (Ratio of Life Expectancy), and economy (Gini Ratio). This research employs a quantitative approach using panel data regression methods (REM and FEM) on data from 34 provinces in Indonesia for the 2020-2024 period, sourced from Statistics Indonesia (BPS). The empirical findings indicate that an increase in the GDI has a positive and significant effect on improving gender parity in education and widening the female life expectancy ratio. However, a paradox was discovered wherein an increase in the GDI also significantly increases income inequality (Gini Ratio). Meanwhile, the GII was not found to have a significant effect on the three dependent variables. In conclusion, gender-based development functions as a positive conversion factor for social capabilities but fails to convert equitably in the economic sector, indicating a stratified progress that ultimately widens economic inequality.

Keywords

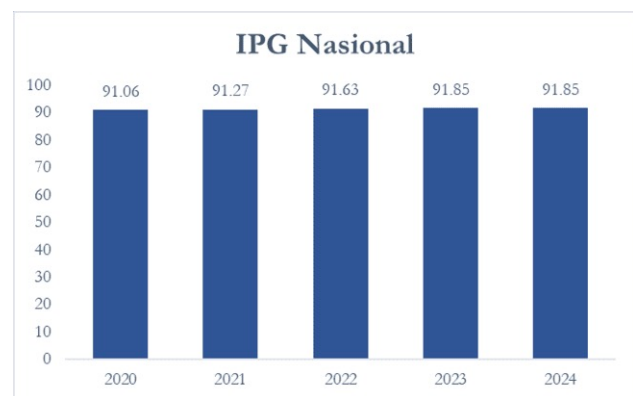
Gender Development Index; Gender Inequality Index; Gini Ratio; Education Gender Parity; Health Access

1. Pendahuluan

Kesetaraan gender secara universal diakui bukan hanya sebagai hak asasi manusia yang fundamental, melainkan juga prasyarat esensial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Di tingkat global, komitmen ini termanifestasi secara eksplisit dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di mana Tujuan 5 secara spesifik menargetkan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan. Agenda ini bertautan erat dengan tujuan-tujuan lain, seperti jaminan kehidupan sehat (Tujuan 3), eliminasi disparitas gender dalam akses pendidikan (Tujuan 4), dan pengurangan ketimpangan pendapatan (Tujuan 10). Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, telah mengadopsi komitmen ini ke dalam kerangka pembangunan nasionalnya. Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya Asta Cita 4, yang dilandasi oleh fondasi konstitusional yang kokoh, termasuk kesamaan kedudukan di hadapan hukum (UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1), hak bebas dari diskriminasi (Pasal 28I Ayat 2), dan ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Rangkaian komitmen legal dari level global hingga konstitusional ini membangun sebuah arsitektur kebijakan yang seharusnya menjadi landasan kuat bagi terwujudnya kesetaraan gender.

Namun, di balik kerangka hukum dan komitmen kebijakan yang solid tersebut, terdapat sebuah paradoks yang mendalam. Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang signifikan dan mengakar di berbagai dimensi kehidupan sosial dan ekonomi. Data mutakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara gamblang melukiskan kesenjangan ini: pada tahun 2024, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja formal hanya mencapai 36,32%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 45,81%, sementara keterwakilan perempuan di posisi manajerial masih rendah, yaitu 35,02% pada tahun 2023. Meskipun Indeks Pembangunan Gender (IPG) nasional menunjukkan peningkatan dari 91,06 pada tahun 2020 menjadi 91,85 pada tahun 2024, laju pertumbuhan yang sangat lambat ini mengindikasikan adanya inersia struktural yang

serius. Stagnasi ini menandakan bahwa kebijakan yang ada belum mampu mengatasi hambatan yang tertanam kuat dalam struktur sosial. Periode analisis 2020-2024 menjadi sangat relevan karena mencakup guncangan sosio-ekonomi global akibat pandemi COVID-19, yang berfungsi sebagai 'uji tekanan' (*stress test*) terhadap struktur sosial yang ada. Krisis ini terbukti secara global memperburuk beban kerja tak berbayar perempuan dan meningkatkan kerentanan ekonomi mereka, sehingga memperlihatkan dan memperkuat kerentanan struktural yang telah ada sebelumnya (İlkkaracan & Memiş, 2021).



Gambar 1. IPG Nasional (BPS, 2025).

Untuk membedah hubungan antara ketidaksetaraan gender dan ketimpangan pembangunan, penelitian ini dilandasi oleh tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi: Teori Feminis Struktural, Teori Institusional, dan Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen. Integrasi ketiga teori ini memungkinkan analisis multilayer, dari level struktur makro hingga mekanisme mikro yang mempengaruhi kehidupan individu. Untuk mengoperasionalkan konsep ketidaksetaraan gender secara empiris, penelitian ini menggunakan dua indeks yang komplementer: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dihitung sebagai rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang mencerminkan kesenjangan capaian pada tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024). Di sisi lain, IKG merupakan adaptasi dari Gender Inequality Index (GII) milik UNDP yang mengevaluasi kerugian

dalam pembangunan akibat ketidaksetaraan. IKG secara spesifik mengukur ketimpangan dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja (BPS, 2024). Penggunaan kedua indeks ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, di mana IPG memotret kesenjangan pencapaian (*achievement gap*), sementara IKG memotret kerugian akibat ketidaksetaraan (*inequality loss*).

Teori Feminis Struktural membingkai ketidaksetaraan gender bukan sebagai kumpulan pilihan individu, melainkan sebagai produk dari struktur sosial sistemik, yaitu patriarki. Dalam kerangka ini, IPG dan IKG berfungsi sebagai proksi kuantitatif dari manifestasi struktur patriarki. IPG mengukur kesenjangan pencapaian, merefleksikan hasil akhir dari struktur yang ada, sementara IKG secara lebih langsung mengukur kerugian (*loss*) akibat diskriminasi dalam dimensi pemberdayaan. Dampak dari struktur ini diterjemahkan menjadi penderitaan konkret, seperti korelasi antara norma gender yang tidak setara dengan gejala depresi yang lebih tinggi pada remaja di Indonesia (Koenig *et al.*, 2021). Konsep patriarchal bargain menjelaskan bagaimana perempuan menavigasi struktur ini dengan membuat kompromi strategis untuk "memaksimalkan keamanan dan mengoptimalkan pilihan hidup" dalam batasan sistem yang ada (Ruslin, 2022).

Selanjutnya, Teori Institusional menawarkan penjelasan untuk paradoks antara kebijakan formal yang progresif dan praktik yang stagnan. Teori ini membedakan institusi formal (hukum) dan informal (norma sosial). Di Indonesia, institusi informal yang kuat seperti norma "kodrat" (peran 'alami' perempuan sebagai pengasuh) dan warisan ideologi "*state ibuwism*" terbukti menetralkan efek dari aturan formal, yang pada akhirnya membatasi partisipasi ekonomi perempuan terlepas dari peningkatan pendidikan mereka (Setyonaluri *et al.*, 2021; Cameron, 2023).

Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen memberikan kedalaman konseptual dengan mendefinisikan pembangunan sebagai perluasan "kapabilitas" atau kebebasan substantif individu untuk mencapai kehidupan yang mereka hargai (Nath & Das, 2024). Melalui lensa ini, variabel dependen dalam penelitian ini ditafsirkan sebagai cerminan perampasan kapabilitas fundamental: Rasio Gini yang tinggi merepresentasikan

pembatasan kapabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat; GPI yang rendah mencerminkan perampasan kapabilitas untuk memperoleh pendidikan; dan rasio AHH yang timpang menunjukkan ketidaksetaraan dalam kapabilitas paling dasar untuk hidup panjang dan sehat. Studi kualitatif menunjukkan bahwa bahkan ketika beberapa "fungsi" (misalnya, kesehatan) tercapai, perempuan mungkin masih menghadapi "ketidakbebasan" (*unfreedoms*) yang persisten di domain lain (Belaid *et al.*, 2021).

Ketiga kerangka teoritis ini disintesis untuk membentuk model penjelasan multilayer. Teori Feminis Struktural menyediakan analisis level makro, Teori Institusional pada level meso, dan Pendekatan Kapabilitas pada level mikro. Jembatan konseptual yang menyatukan ketiganya adalah konsep "faktor konversi" (*conversion factors*) dari Amartya Sen. Kerangka terintegrasi ini memposisikan struktur patriarki dan institusi informal sebagai faktor konversi sosial negatif yang aktif. Dalam model ini, struktur patriarki (Teori Feminis Struktural) yang beroperasi melalui institusi informal (Teori Institusional) secara sistematis menghambat kemampuan perempuan untuk mengkonversi sumber daya (misalnya, pendidikan) menjadi "fungsi" yang bernilai (misalnya, pekerjaan manajerial). Studi empiris menunjukkan bagaimana "faktor konversi sosial" seperti norma budaya identik dengan "hambatan struktural" dan "institusi informal" (Alotaibi *et al.*, 2025). Penelitian lain menemukan bahwa norma gender dapat berfungsi sebagai filter yang menghambat konversi modal manusia perempuan menjadi modal sosial dan politik (Schmidt *et al.*, 2022). Dengan demikian, IKG berfungsi sebagai proksi bagi intensitas faktor konversi sosial negatif, sementara IPG menjadi proksi bagi hasil akhir dari faktor-faktor tersebut. Keduanya merefleksikan kondisi struktural yang menghambat kapabilitas perempuan, yang pada gilirannya bermanifestasi sebagai ketimpangan yang lebih luas.

Meskipun literatur mengenai gender dan pembangunan di Indonesia cukup melimpah, analisis mendalam menunjukkan adanya keterbatasan yang membuka ruang bagi kontribusi signifikan dari penelitian ini. Sebagian besar literatur yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola utama. Pertama,

dominasi paradigma *efficiency approach*. Pola paling menonjol dalam literatur kuantitatif di Indonesia adalah pemingkiaan kesetaraan gender sebagai variabel instrumental untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Wibawa *et al.* (2024) di Riau dan Febriana & Hailuddin (2024) di Nusa Tenggara Barat, secara eksplisit menguji pengaruh indikator gender terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Demikian pula, Adika & Rahmawati (2021) menganalisis dampak indikator gender terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Meskipun penting, fokus pada pertumbuhan ini mengabaikan pertanyaan fundamental tentang distribusi. Penelitian ini secara sadar menggeser fokus dari pertumbuhan (ukuran agregat) ke ketimpangan (ukuran distribusi).

Kedua, kecenderungan analisis determinan, bukan konsekuensi. Beberapa studi kuantitatif memosisikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai variabel dependen untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukannya. Sebagai contoh, penelitian oleh Abidin *et al.* (2022) di Jawa Barat dan Aprilianti & Setiadi (2022) pada level nasional sama-sama meneliti determinan dari IPG. Begitu pula studi oleh Siregar *et al.* (2024) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan. Studi-studi ini menjawab pertanyaan "apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender?". Penelitian ini memberikan kontribusi dengan membalik lensa kausalitas untuk menjawab "apa dampak atau konsekuensi dari adanya ketidaksetaraan gender?", sebuah area yang secara komparatif kurang dieksplorasi.

Ketiga, fragmentasi geografi dan keterbatasan metodologis. Banyak studi yang ada merupakan studi kasus pada satu provinsi atau bahkan satu kota, seperti di Riau, Jawa Barat, NTB, Sulawesi Selatan, dan Surakarta. Temuan dari studi-studi ini tidak dapat digeneralisasikan di tingkat nasional. Selain itu, banyak studi masih mengandalkan pendekatan deskriptif-kualitatif (misalnya, Larashati, 2022) atau model regresi *cross-section* yang statis (misalnya, Aprilianti & Setiadi, 2022), yang rentan terhadap bias estimasi. Penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggunakan data panel yang mencakup 34 provinsi dan menerapkan

model ekonometrik yang secara statistik lebih unggul dalam mengisolasi hubungan kausal.

Berdasarkan kesenjangan inilah, masalah penelitian dirumuskan. Meskipun bukti deskriptif mengenai kesenjangan gender sudah banyak tersedia, masih terdapat kelangkaan analisis kuantitatif inferensial yang secara komprehensif menguji konsekuensi dari ketidaksetaraan gender sistemik ini terhadap dimensi-dimensi ketimpangan pembangunan lainnya di tingkat sub-nasional. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang akan dijawab oleh penelitian ini adalah: "Sejauh mana tingkat ketidaksetaraan gender di tingkat provinsi secara dinamis mempengaruhi ketimpangan akses di sektor pendidikan, ketimpangan hasil kesehatan, dan ketimpangan pendapatan secara umum di Indonesia selama periode 2020-2024?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menetapkan beberapa tujuan spesifik:

1. Menganalisis pengaruh signifikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terhadap Gender Parity Index dalam Angka Partisipasi Murni (APM) di sektor pendidikan.
2. Menganalisis pengaruh signifikan IPG dan IKG terhadap rasio Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan terhadap laki-laki sebagai proksi ketimpangan hasil kesehatan.
3. Menganalisis pengaruh signifikan IPG dan IKG terhadap Rasio Gini sebagai proksi ketimpangan pendapatan.

2. Metode

2.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain regresi data panel. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan gender dan kesetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta ekonomi di Indonesia. Dengan menggunakan data panel, penelitian ini dapat menganalisis dua dimensi data, yaitu lintas provinsi dan waktu, yang memungkinkan kontrol terhadap variabel yang tidak teramati di antara provinsi dan sepanjang waktu. Pendekatan ini lebih sesuai karena dapat menangkap dinamika ketimpangan gender dan akses

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
Variabel Dependen			
Gender Parity Index (GPI)	Perbandingan partisipasi murni antara perempuan dan laki-laki di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di setiap provinsi.	Rasio Paritas	Badan Pusat Statistika
Angka Harapan Hidup (AHH)	Perbandingan angka harapan hidup antara perempuan dan laki-laki	Rasio Paritas	Badan Pusat Statistika
Rasio Gini	Mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di setiap provinsi	Indeks (0-1)	Badan Pusat Statistika
Variabel Independen			
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Menunjukkan perbedaan dalam tingkat pembangunan manusia antara gender mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.	Rasio Paritas	Badan Pusat Statistika
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Mengukur tingkat ketimpangan gender di berbagai sektor sosial dan ekonomi, termasuk sektor pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik	Indeks (0-1)	Badan Pusat Statistika
Variabel Kontrol			
Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di setiap provinsi	Persentase (%)	Badan Pusat Statistika
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan jumlah penduduk tahunan di setiap provinsi	Persentase (%)	Badan Pusat Statistika
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja di setiap provinsi	Persentase (%)	Badan Pusat Statistika
PDRB per Kapita	PDRB riil per kapita atas dasar harga berlaku	Rupiah (dalam ln)	Badan Pusat Statistika

Sumber: diolah penulis (2025).

terhadap sektor-sektor tersebut di berbagai provinsi dalam periode waktu yang berbeda (Gujarati, 2011; Baltagi, 2008).

2.2. Objek dan Periode Penelitian

Objek penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia sebelum pemekaran Papua, dengan rentang waktu dari 2020 hingga 2024. Penelitian ini fokus pada ketimpangan gender dan kesetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi. Rentang waktu lima tahun dipilih untuk menganalisis tren jangka pendek dan perubahan yang terjadi dalam periode tersebut.

2.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS. Data BPS mencakup indikator-indikator yang relevan terkait ketimpangan gender, pendidikan, kesehatan, ketimpangan ekonomi, dan variabel kontrol seperti kemiskinan, pertumbuhan

penduduk, dan pengangguran. Penggunaan data sekunder ini memastikan bahwa data yang digunakan telah tervalidasi dan dapat dipercaya, mengingat kredibilitas BPS sebagai lembaga resmi statistik nasional.

2.4. Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel yang dapat menangkap hubungan antara ketimpangan gender dengan kesetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi. Rincian lengkap mengenai pengukuran dan sumber data dari setiap variabel disajikan pada Tabel 1.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel. Teknik ini dipilih untuk mengatasi variasi antar provinsi dan sepanjang waktu yang ada dalam data. Sebelum melakukan regresi, dilakukan uji pemilihan model untuk menentukan apakah model efek tetap (*fixed effects*) atau efek acak (*random effects*) yang lebih

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
Y1	170	105.1956	6.817241	89.27	125.76
Y2	170	105.6757	0.273334	104.9303	106.0747
Y3	170	0.344215	0.043548	0.2395	0.449
X1	170	90.808	3.12715	79.59	95.56
X2	170	0.454841	0.095608	0.142	0.665
K1	170	10.18762	5.128344	3.9	27.12
K2	170	1.420647	0.525839	0.31	4.13
K3	170	5.114235	1.734131	1.79	10.95
K4	170	11.03274	0.572999	9.906334	12.74941

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

sesuai. Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang tepat berdasarkan hasil perbandingan antara kedua model tersebut (Hausman, 1978). Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk memeriksa adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika terdapat pelanggaran terhadap asumsi ini, regresi robust dipilih untuk menghasilkan estimasi yang lebih konsisten meskipun ada masalah pada asumsi klasik (White, 1980). Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah ketimpangan gender memiliki pengaruh signifikan terhadap kesetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi. Uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F.

2.6. Persamaan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan tiga model regresi untuk menguji hubungan antara ketimpangan gender dan kesetaraan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi. Setiap model menggunakan variabel yang sama sebagai kontrol, tetapi dengan variabel dependen yang berbeda. Setiap model regresi ini akan digunakan untuk menguji hubungan antara ketimpangan gender (indeks pembangunan gender dan ketimpangan gender) dengan tiga indikator akses (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). Uji signifikansi dilakukan untuk menguji pengaruh ketimpangan gender

terhadap masing-masing indikator akses. Adapun model regresi yang digunakan sebagai berikut.

$$Y_{1it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 K_{1it} + \beta_4 K_{2it} + \beta_5 K_{3it} + \beta_6 \ln(K_{4it}) + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_{2it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 K_{1it} + \beta_4 K_{2it} + \beta_5 K_{3it} + \beta_6 \ln(K_{4it}) + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

$$Y_{3it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 K_{1it} + \beta_4 K_{2it} + \beta_5 K_{3it} + \beta_6 \ln(K_{4it}) + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- Y_{1it} = Gender Parity Index di provinsi i pada tahun t
- Y_{2it} = Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan dan Laki-laki di provinsi i pada tahun t
- Y_{3it} = Rasio Gini di provinsi i pada tahun t
- X_{1it} = Indeks Pembangunan Gender di provinsi i pada tahun t
- X_{2it} = Indeks Ketimpangan Gender di provinsi i pada tahun t
- K_{1it} = Tingkat kemiskinan di provinsi i pada tahun t
- K_{2it} = Tingkat pertumbuhan penduduk di provinsi i pada tahun t
- K_{3it} = Tingkat pengangguran terbuka di provinsi i pada tahun t
- $\ln(K_{4it})$ = Logaritma Natural Produk Domestik Regional Bruto di provinsi i pada tahun t
- ϵ_{it} = Error term

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 2 statistik deskriptif, data yang digunakan merupakan data panel seimbang (balanced

panel) dengan total 170 observasi dari 34 provinsi selama 5 tahun. Secara rata-rata, tingkat partisipasi perempuan di SMA (Y1) sedikit lebih tinggi daripada laki-laki (Mean = 105.19), dan rasio harapan hidup perempuan (Y2) 5.67% lebih tinggi (Mean = 105.67). Sementara itu, rata-rata Indeks Pembangunan Gender (X1) sebesar 90.80 menunjukkan masih adanya ketertinggalan perempuan, dan rata-rata Rasio Gini (Y3) di level 0.344 mengindikasikan ketimpangan pendapatan rendah-sedang. Data ini menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi, terutama pada tingkat kemiskinan (K1) dengan rentang 3.9% hingga 27.12%, dan tingkat pengangguran (K3) dari 1.79% hingga 10.95%. Sebaliknya, Rasio AHH (Y2) sangat homogen dengan standar deviasi yang sangat kecil (0.273).

3.2. Uji Pemilihan Model Regresi

Hasil Uji Chow digunakan untuk memilih antara Common Effects Model (CEM) dan Fixed Effects Model (FEM), dengan hipotesis nol (H_0) menyatakan CEM lebih tepat. Berdasarkan Tabel 3, Model 1, Model 2, dan Model 3 seluruhnya menunjukkan nilai $\text{Prob} > F = 0.0000$. Karena nilai p-value ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak untuk ketiga model. Kesimpulannya, Fixed Effects Model (FEM) terbukti lebih tepat digunakan daripada CEM untuk seluruh model penelitian ini, sehingga CEM tereliminasi dari pengujian selanjutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Model 1	$\text{Prob} > F = 0.0000$
Model 2	$\text{Prob} > F = 0.0000$
Model 3	$\text{Prob} > F = 0.0000$

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM), dengan Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa REM adalah model yang tepat. Berdasarkan hasil Tabel 4, Model 1 ($\text{Prob} > \chi^2 = 0.1147$) dan Model 2 ($\text{Prob} > \chi^2 = 0.0511$) memiliki p-value lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, sehingga Gagal Tolak H_0 . Ini berarti REM adalah model yang terpilih untuk kedua model tersebut. Sebaliknya,

Model 3 menunjukkan nilai $\text{Prob} > \chi^2 = 0.00015$, yang lebih kecil dari $\alpha = 0.05$, sehingga Tolak H_0 . Kesimpulannya, FEM adalah model yang terpilih untuk Model 3.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Model 1	$\text{Prob} > \chi^2 = 0.1147$
Model 2	$\text{Prob} > \chi^2 = 0.0511$
Model 3	$\text{Prob} > \chi^2 = 0.0001$

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

Uji Lagrange Multiplier (LM) atau Uji Breusch-Pagan digunakan sebagai uji pendahuluan dalam pemilihan model regresi data panel, khususnya untuk memilih antara Common Effects Model (CEM) dan Random Effects Model (REM), dengan Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa CEM adalah model yang paling tepat. Berdasarkan hasil Tabel 5, ketiga model menunjukkan nilai $\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$. Karena nilai p-value ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak untuk Model 1, Model 2, dan Model 3. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat efek individu yang signifikan yang tidak dapat ditangkap oleh CEM, sehingga Random Effects Model (REM) lebih unggul dibandingkan CEM untuk semua model.

Tabel 5. Hasil Uji LM

Model 1	$\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$
Model 2	$\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$
Model 3	$\text{Prob} > \chi^2 = 0.0000$

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

Berdasarkan hasil uji pemilihan model yang mencakup Uji Chow dan Uji Hausman (lihat Tabel 6), dapat disimpulkan bahwa Model 1 dan Model 2 terpilih menggunakan Random Effects Model (REM), yang mengindikasikan bahwa perbedaan antar provinsi (efek individu) bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Sebaliknya, Model 3 terpilih menggunakan Fixed Effects Model (FEM), yang menyiratkan bahwa perbedaan antar provinsi bersifat spesifik dan berkorelasi dengan variabel independen,

sehingga model ini mengontrol variasi yang tidak teramati antar provinsi.

Tabel 6. Hasil Model Terpilih

Model 1	REM
Model 2	REM
Model 3	FEM

Sumber: diolah penulis (2025).

3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik pada lihat [Tabel 7](#) menunjukkan bahwa Multikolinearitas tidak menjadi masalah pada ketiga model, dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1.69 yang jauh di bawah ambang batas 10. Namun, masalah serius terdeteksi pada asumsi lain untuk semua model. Uji Autokorelasi dan Heteroskedastisitas tidak lolos untuk Model 1, Model 2, dan Model 3, ditunjukkan oleh nilai p-value yang sangat kecil (0.0000 hingga 0.00042), yang berarti varians error tidak konstan dan terdapat korelasi serial pada error. Meskipun Model 1 dan Model 3 lolos Uji Normalitas ($p > 0.05$), Model 2 tidak lolos Uji Normalitas ($p = 0.0000$). Pelanggaran normalitas ini umumnya tidak fatal, terutama karena jumlah observasi total ($N=170$) cukup besar. Berdasarkan Central Limit Theorem (CLT), distribusi estimasi koefisien akan cenderung mendekati normal, sehingga inferensi statistik (Uji t dan Uji F) cenderung tetap valid. Meskipun demikian, pelanggaran asumsi Heteroskedastisitas dan Autokorelasi yang terjadi pada ketiga model mengharuskan penggunaan metode estimasi robust, seperti Clustered Robust Standard Errors, untuk mengoreksi standard error model. Langkah ini harus diambil untuk memastikan bahwa hasil Uji t dan Uji F tetap valid dan konsisten meskipun adanya pelanggaran asumsi klasik tersebut.

Tabel 7. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Uji	Prob/(VIF)	Hasil
Model 1	Uji Normalitas	0.4264	Lolos uji
	Uji Autokorelasi	0.0000	Tidak lolos uji
	Uji Heteroskedastisitas	0.0000	Tidak lolos uji
	Uji Multikolinearitas	1.69	Lolos uji

Model	Uji	Prob/(VIF)	Hasil
Model 2	Uji Normalitas	0.00000	Tidak lolos uji
	Uji Autokorelasi	0.00042	Tidak lolos uji
	Uji Heteroskedastisitas	0.0000	Tidak lolos uji
	Uji Multikolinearitas	1.69	Lolos uji
Model 3	Uji Normalitas	0.2575	Lolos uji
	Uji Autokorelasi	0.0000	Tidak lolos uji
	Uji Heteroskedastisitas	0.0000	Tidak lolos uji
	Uji Multikolinearitas	1.69	Lolos uji

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

3.4. Uji Regresi Data Panel

Hasil Uji F digunakan untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan (simultan), dengan Hipotesis Nol (H_0) menyatakan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan [Tabel 8](#), Model 1, Model 2, dan Model 3 seluruhnya menunjukkan nilai Prob > F/Prob > Chi2 sebesar 0.0000. Karena nilai p-value ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak untuk ketiga model. Kesimpulannya, variabel-variabel independen yang digunakan (Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB per Kapita) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen masing-masing (Gender Parity Index, Rasio Angka Harapan Hidup, dan Rasio Gini).

Tabel 8. Hasil Uji

Model	F/Wald chi2	Prob>F/Prob>Chi2
Model 1	35.57	0.0000
Model 2	36.91	0.0000
Model 3	1037.46	0.0000

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

Hasil Uji t (signifikansi parsial) untuk Model 1 (variabel dependen Y1, Gender Parity Index) (lihat [Tabel](#)

Tabel 9. Hasil Uji t Model 1

Y1	Coefficient	Std. error	t	P> t	[95% conf. interval]		Keputusan
X1	0.766147	0.370155	2.07	0.038	0.040657	1.491637	Tolak H_0
X2	8.21502	12.55674	0.65	0.513	-16.3957	32.82577	Gagal tolak H_0
K1	0.272957	0.223594	1.22	0.222	-0.16528	0.711192	Gagal tolak H_0
K2	0.518562	0.722679	0.72	0.473	-0.89786	1.934987	Gagal tolak H_0
K3	-1.22184	0.330859	-3.69	0.000	-1.87031	-0.57337	Tolak H_0
K4	1.440585	1.364258	1.06	0.291	-1.23331	4.114482	Gagal tolak H_0
C	18.72454	44.47171	0.42	0.674	-68.4384	105.8875	

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

Tabel 10. Hasil Uji t Model 2

Y2	Coefficient	Std. error	t	P> t	[95% conf. interval]		Keputusan
X1	0.034226	0.012622	2.71	0.007	0.009488	0.058965	Tolak H_0
X2	0.618262	0.516251	1.20	0.231	-0.393572	1.630096	Gagal tolak H_0
K1	0.011208	0.008261	1.36	0.175	-0.004983	0.027399	Gagal tolak H_0
K2	-0.036724	0.022865	-1.61	0.108	-0.081538	0.008090	Gagal tolak H_0
K3	-0.072838	0.018730	-3.89	0.000	-0.109549	-0.036127	Tolak H_0
K4	0.060631	0.084620	0.72	0.474	-0.105220	0.226482	Gagal tolak H_0
C	101.928	1.878	54.28	0.000	98.247	105.609	Tolak H_0

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

9) menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap GPI: X1 (Indeks Pembangunan Gender) dan K3 (Tingkat Pengangguran Terbuka). Koefisien X1 (0.766147) dengan $P>|t| = 0.038$ yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa peningkatan IPG secara signifikan meningkatkan GPI, sementara koefisien K3 (-1.22184) dengan $P>|t| = 0.000$ yang juga lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan justru menurunkan GPI. Sebaliknya, variabel X2 (IKG), K1 (Tingkat Kemiskinan), K2 (Pertumbuhan Penduduk), dan K4 (PDRB per Kapita) tidak berpengaruh signifikan

karena nilai $P>|t|$ mereka (berturut-turut 0.513, 0.222, 0.473, dan 0.291) semuanya lebih besar dari 0.05.

Hasil Uji t (signifikansi parsial) untuk Model 2 (variabel dependen Y2, Rasio Angka Harapan Hidup) (lihat Tabel 10) menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Rasio AHH: X1 (Indeks Pembangunan Gender) dan K3 (Tingkat Pengangguran Terbuka). Koefisien X1 (0.034226) dengan $P>|t| = 0.007$ (lebih kecil dari 0.05) menunjukkan bahwa peningkatan IPG secara signifikan meningkatkan Rasio AHH, sementara koefisien K3 (-0.072838) dengan $P>|t| = 0.000$ (lebih kecil dari 0.05) menunjukkan bahwa

Tabel 11. Hasil Uji t Model 3

Y3	Coefficient	Std. error	t	P> t	[95% conf. interval]		Keputusan
X1	3.602891	0.673632	5.35	0.000	2.232376	4.973406	Tolak H_0
X2	0.884459	7.249883	0.12	0.904	-13.8655	15.63446	Gagal tolak H_0
K1	2.415956	0.287311	8.41	0.000	1.831417	3.000494	Tolak H_0
K2	0.541836	1.201809	0.45	0.655	-1.90326	2.986935	Gagal tolak H_0
K3	-0.91411	0.364418	-2.51	0.017	-1.65553	-0.1727	Tolak H_0
K4	1.161443	1.134161	1.02	0.313	-1.14602	3.46891	Gagal tolak H_0
C	-255.9	62.87269	-4.07	0.000	-383.815	-127.984	

Sumber: STATA, diolah penulis (2025).

peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan justru menurunkan Rasio AHH. Sebaliknya, variabel X2 (IKG), K1 (Tingkat Kemiskinan), K2 (Pertumbuhan Penduduk), dan K4 (PDRB per Kapita) tidak berpengaruh signifikan secara parsial karena nilai $P>|t|$ mereka (berturut-turut 0.231, 0.175, 0.108, dan 0.474) semuanya lebih besar dari 0.05.

Hasil Uji t (signifikansi parsial) untuk Model 3 (variabel dependen Y3, Rasio Gini/Ketimpangan Ekonomi) (lihat Tabel 11) menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, tiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Rasio Gini. Variabel X1 (Indeks Pembangunan Gender) dengan $P>|t| = 0.000$ dan koefisien positif (3.602891) menunjukkan bahwa peningkatan IPG secara signifikan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Variabel K1 (Tingkat Kemiskinan) dengan $P>|t| = 0.000$ dan koefisien positif (2.415956) juga secara signifikan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, variabel K3 (Tingkat Pengangguran Terbuka) dengan $P>|t| = 0.017$ dan koefisien negatif (-0.91411) menunjukkan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran justru secara signifikan menurunkan ketimpangan ekonomi. Sementara itu, variabel X2 (IKG), K2 (Pertumbuhan Penduduk), dan K4 (PDRB per Kapita) tidak berpengaruh signifikan secara parsial karena nilai $P>|t|$ mereka (berturut-turut 0.904, 0.655, dan 0.313) semuanya lebih besar dari 0.05.

3.5. Pembahasan

Bagian ini menyajikan analisis mendalam atas temuan-temuan empiris penelitian, dengan tujuan untuk menginterpretasikan signifikansi statistik dan implikasi substantif dari hubungan antara ketidaksetaraan gender dengan hasil pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di 34 provinsi Indonesia selama periode 2020-2024. Analisis ini tidak hanya berhenti pada pemaparan koefisien regresi, melainkan berupaya membongkar mekanisme kausal yang mendasarinya. Untuk mencapai kedalaman analisis yang diperlukan, pembahasan ini distrukturkan ke dalam tiga sub-bagian utama. Masing-masing akan mengaitkan temuan kuantitatif dengan kerangka teori terintegrasi, mulai dari Teori Feminis Struktural, Teori Institusional, hingga Pendekatan Kapabilitas, serta menempatkannya dalam dialog kritis dengan lanskap literatur akademis terkini untuk menghasilkan analisis yang tajam, berlapis, dan komprehensif, sebagaimana yang dituntut oleh kompleksitas isu yang dikaji.

3.5.1. Pembangunan Gender sebagai Katalisator Perluasan Kapabilitas Pendidikan

Analisis pada model pertama memberikan konfirmasi empiris yang kuat mengenai peran sentral pembangunan berbasis gender dalam mendorong kesetaraan akses pendidikan, sekaligus menyingkap kerapuhan kemajuan tersebut di hadapan guncangan ekonomi makro. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa Indeks

Pembangunan Gender (IPG) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Paritas Gender (GPI) pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ($\beta = 0.766$, $p = 0.038$). Temuan ini secara langsung mendukung hipotesis penelitian dan memberikan validasi empiris yang kokoh terhadap argumen bahwa peningkatan capaian pembangunan manusia perempuan, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, secara langsung berkontribusi pada penutupan kesenjangan partisipasi pendidikan di tingkat menengah. Setiap kenaikan satu poin pada IPG di tingkat provinsi diprediksi akan meningkatkan GPI sebesar 0.766 poin, mengindikasikan pergerakan menuju paritas yang lebih ideal. Dalam perspektif Pendekatan Kapabilitas, hasil ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti nyata dari proses konversi kapabilitas. IPG, sebagai indeks komposit, merepresentasikan kapabilitas-kapabilitas fundamental. Pengaruhnya yang signifikan terhadap GPI menunjukkan bahwa ketika kapabilitas dasar perempuan diperkuat, mereka lebih mampu mengkonversinya menjadi “fungsi” yang bernilai, yaitu berpartisipasi dalam pendidikan tingkat lanjut. Dengan demikian, pembangunan gender bukan sekadar tujuan akhir, melainkan sebuah mekanisme instrumental yang memperluas kebebasan substantif (*substantive freedom*) perempuan untuk memilih dan mencapai kehidupan yang mereka hargai (Nath & Das, 2024). Signifikansi IPG sebagai indeks komposit juga menyiratkan sebuah implikasi kebijakan yang penting: keberhasilan dalam mencapai paritas pendidikan tidak dapat direduksi menjadi intervensi di sektor pendidikan semata. Fakta bahwa indeks yang turut mengukur kesehatan dan standar hidup memiliki daya prediksi yang kuat terhadap partisipasi sekolah menunjukkan adanya efek sinergis. Perbaikan status kesehatan anak perempuan, misalnya, dapat mengurangi angka absensi dan putus sekolah. Demikian pula, peningkatan standar hidup layak bagi perempuan dapat mengurangi tekanan ekonomi pada keluarga yang seringkali memaksa anak perempuan untuk berhenti sekolah demi bekerja atau menikah dini. Ini menegaskan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan adalah strategi yang paling efektif untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, temuan yang paling menonjol dari model ini adalah pengaruh negatif yang sangat signifikan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap GPI ($\beta = -1.221$, $p = 0.000$). Ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang lesu merupakan hambatan struktural yang kuat bagi partisipasi pendidikan perempuan. Temuan ini sangat selaras dengan lensa Teori Feminis Struktural dan Teori Institusional. Dalam kondisi krisis atau tekanan ekonomi, struktur patriarki yang mengakar akan semakin menguat (Setyonaluri *et al.*, 2021). Keluarga, sebagai unit ekonomi mikro, akan membuat keputusan alokasi sumber daya yang terbatas berdasarkan institusi informal seperti norma gender yang ada. Pendidikan anak laki-laki seringkali dipandang sebagai investasi jangka panjang yang lebih aman, sementara pendidikan anak perempuan dianggap lebih berisiko atau kurang memberikan imbal hasil ekonomi langsung. Fenomena ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari patriarchal bargain, di mana keluarga secara strategis memperkuat hierarki gender untuk memaksimalkan persepsi keamanan ekonomi kolektif dalam situasi yang tidak menentu (Ruslin, 2022). Kondisi ini diperkuat oleh temuan dari penelitian lain di Indonesia yang menyoroti tantangan lulusan sekolah kejuruan (SMK). Hermawan *et al.* (2023) menemukan bahwa meskipun tingkat pengangguran lulusan SMK laki-laki sedikit lebih tinggi, terdapat variabel-variabel yang secara unik menghambat perempuan, seperti klasifikasi tempat tinggal (perkotaan/pedesaan) yang secara signifikan memengaruhi status pengangguran lulusan SMK perempuan, tetapi tidak bagi laki-laki. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi yang sulit, mobilitas dan peluang kerja perempuan lebih terbatas, yang pada gilirannya dapat menurunkan insentif bagi keluarga untuk menyekolahkan anak perempuan hingga jenjang SMA.

Kontras antara pengaruh IPG yang signifikan dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang tidak signifikan menyingkap sebuah pemahaman yang lebih bernuansa. IPG mengukur kesenjangan capaian (*achievement gap*), sementara IKG mengukur kerugian (*inequality loss*) akibat disempowerment pada domain spesifik seperti kesehatan reproduksi dan pemberdayaan politik.¹ Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan di tingkat rumah tangga untuk menyekolahkan anak perempuan lebih sensitif terhadap perbaikan kondisi

umum keluarga (yang tercermin dalam IPG) daripada terhadap hambatan-hambatan struktural yang lebih dalam yang ditangkap oleh IKG. Dampak dari rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen atau tingginya angka kematian ibu kemungkinan besar lebih terasa pada jenjang yang lebih tinggi atau dalam transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Secara keseluruhan, temuan dalam Model 1 ini mengungkap sebuah potensi ketegangan kebijakan: upaya pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender melalui program-program yang meningkatkan IPG dapat terancam efektivitasnya jika tidak diimbangi dengan kebijakan makroekonomi yang stabil dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Tanpa jaring pengaman ekonomi yang kuat, kemajuan dalam pembangunan gender di bidang pendidikan tetap rapuh dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

3.5.2. Dampak Pembangunan Gender terhadap Ekuitas Luaran Kesehatan

Sejalan dengan temuan di sektor pendidikan, analisis pada model kedua menunjukkan bahwa peningkatan IPG juga berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap rasio Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan terhadap laki-laki ($\beta = 0.034$, $p = 0.007$). Mengingat variasi pada variabel dependen ini sangat kecil antar provinsi (standar deviasi hanya 0.273), deteksi pengaruh yang signifikan ini menjadi sangat penting. Ini berarti, semakin kecil kesenjangan pembangunan manusia antara gender, semakin besar keunggulan harapan hidup perempuan relatif terhadap laki-laki. Temuan ini perlu dipahami dalam konteks fenomena global yang dikenal sebagai *female biological advantage*, di mana perempuan secara konsisten memiliki harapan hidup lebih tinggi dibandingkan laki-laki di hampir semua negara (Wang *et al.*, 2019). Namun, keunggulan biologis ini bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan merupakan sebuah potensi yang realisasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi. Di sinilah temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting. Peningkatan IPG dapat dilihat sebagai “faktor konversi positif” dalam kerangka Kapabilitas Sen. Ketika perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dan standar hidup yang lebih layak (komponen utama IPG), mereka diberdayakan untuk membuat pilihan-pilihan yang lebih menunjang kesehatan, memiliki akses

yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, serta memiliki agensi yang lebih besar atas tubuh dan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ini memungkinkan perempuan untuk memaksimalkan potensi keunggulan biologis mereka, yang pada akhirnya termanifestasi dalam rasio AHH yang lebih tinggi.

Berbagai studi mendukung mekanisme ini. Secara global, peningkatan kesetaraan gender secara konsisten berasosiasi dengan peningkatan harapan hidup bagi kedua jenis kelamin (Hosseinpour *et al.*, 2023). Di konteks Indonesia, studi oleh Lestari dan Susanti (2025) serta Pramesty *et al.* (2025) menemukan bahwa pemberdayaan perempuan, baik secara finansial maupun sosial, secara signifikan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu. Pemberdayaan ini, yang merupakan buah dari peningkatan pendidikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi, secara langsung mengurangi risiko kematian ibu dan meningkatkan kesehatan perempuan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengaruh positif IPG terhadap rasio AHH dapat dipahami sebagai hasil kumulatif dari peningkatan agensi, pengetahuan kesehatan, dan kemampuan ekonomi perempuan untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas sepanjang siklus hidup mereka. Seperti halnya pada model pendidikan, IKG kembali tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap rasio AHH. Interpretasi atas temuan ini pun serupa: AHH adalah indikator kesehatan populasi yang sangat agregat. Luaran ini tampaknya lebih responsif terhadap perbaikan kualitas hidup secara umum yang ditangkap oleh IPG.

Meskipun dimensi yang diukur IKG, seperti kesehatan reproduksi yang buruk, secara tragis berkontribusi pada angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia, dampak statistiknya kemungkinan terdilusi ketika dirata-ratakan ke dalam perhitungan harapan hidup untuk seluruh populasi perempuan dari berbagai kelompok usia. Ketidadaan signifikansi IKG dalam model ini tidak boleh diartikan bahwa pemberdayaan politik dan ekonomi tidak penting. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa jalur kausalnya beroperasi pada skala waktu yang lebih panjang daripada yang dapat ditangkap oleh data panel lima tahun ini. Peningkatan jumlah perempuan di parlemen, misalnya, mungkin tidak akan secara instan mengubah rasio

harapan hidup. Namun, dalam jangka waktu satu dekade, representasi politik yang lebih baik ini dapat mengarah pada pengesahan anggaran dan kebijakan kesehatan yang lebih responsif gender, yang pada akhirnya akan memengaruhi hasil kesehatan.

3.5.3. Paradoks Pembangunan Gender dan Eskalasi Ketimpangan Ekonomi

Bagian ini membahas temuan yang paling menonjol, kompleks, dan bersifat paradoksial dari penelitian ini, yang terungkap melalui Model 3. Hasil analisis menunjukkan sebuah hubungan di mana kemajuan dalam pembangunan gender justru berkorelasi dengan peningkatan ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. Temuan ini menuntut dekonstruksi kritis terhadap narasi linear bahwa kesetaraan gender secara otomatis akan menghasilkan masyarakat yang lebih egaliter, dan memerlukan sintesis dari ketiga kerangka teoritis yang digunakan untuk memberikan penjelasan yang memadai.

Hasil regresi Model 3 (Fixed Effects Model) secara mengejutkan menunjukkan bahwa peningkatan IPG memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Rasio Gini ($\beta = 3.602$, $p=0.000$). Dengan kata lain, seiring dengan keberhasilan Indonesia dalam menutup kesenjangan gender dalam capaian pembangunan manusia, ketimpangan distribusi pendapatan secara keseluruhan justru cenderung memburuk. Fenomena ini dapat disebut sebagai "Paradoks Pembangunan Gender Indonesia", yang memiliki kemiripan konseptual dengan "Paradoks MENA (Middle East and North Africa)" di mana peningkatan pesat pendidikan perempuan tidak berujung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, melainkan pada peningkatan pengangguran perempuan terdidik (Assaad *et al.*, 2021). Diadaptasi ke konteks ketimpangan pendapatan di Indonesia, hipotesis utama untuk menjelaskan paradoks ini adalah "Hipotesis Kemajuan Bertingkat" (*Stratified Progress*).

Peningkatan IPG, yang mencerminkan kenaikan rata-rata pendidikan dan pendapatan perempuan, kemungkinan besar tidak terdistribusi secara merata. Sebaliknya, manfaat ini cenderung terkonsentrasi pada segmen perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, kemungkinan besar tinggal di perkotaan, dan memiliki akses ke pekerjaan profesional dan manajerial.

Ketika kelompok perempuan elit ini mengalami peningkatan pendapatan, pendapatan rata-rata perempuan (dan IPG) memang meningkat. Namun, pada saat yang sama, kesenjangan pendapatan di antara perempuan, yaitu antara kelompok elit ini dengan mayoritas perempuan yang masih terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah, justru melebar. Peningkatan ketimpangan intra-perempuan (*intra-female inequality*) inilah yang kemudian berkontribusi pada kenaikan Rasio Gini secara keseluruhan. Studi oleh Nurhidayah & Susilowati (2022) di Indonesia mengonfirmasi fenomena feminization of inequality ini, menemukan hubungan positif antara IPG dan Rasio Gini.

Penjelasan terhadap paradoks ini menuntut sintesis dari ketiga kerangka teoretis. Hambatan struktural dan institusional yang persisten berfungsi sebagai "faktor konversi negatif" yang kuat, yang secara sistematis menghalangi mayoritas perempuan untuk mengubah modal manusia mereka yang meningkat menjadi keuntungan ekonomi yang setara. Perempuan memasuki pasar kerja yang tidak setara, yang dibentuk oleh struktur patriarki (Teori Feminis Struktural) dan dilanggengkan oleh institusi informal yang mengakar kuat seperti norma "kodrat" (Teori Institusional) (Setyonaluri *et al.*, 2021; Cameron, 2023). Akibatnya, terjadi sebuah proses bifurkasi: hanya segelintir perempuan dengan modal sosial dan ekonomi tinggi yang mampu menembus "langit-langit kaca", sementara mayoritas lainnya terpaksa menerima pekerjaan di sektor informal berupa rendah atau keluar dari angkatan kerja (Amalia & Rachmawati, 2025). Temuan ini diperkuat oleh pengaruh IKG yang juga positif dan signifikan terhadap Rasio Gini, sebuah temuan yang terungkap dalam analisis awal namun sering terabaikan ($\beta = 0.054$, $p=0.000$). Berbeda dengan IPG, hubungan ini tidak paradoksial dan sangat konsisten dengan Teori Feminis Struktural. IKG adalah proksi untuk kerugian struktural dan disempowerment perempuan. Disempowerment ini menciptakan kondisi untuk eksploitasi tenaga kerja dan distribusi kekayaan yang tidak adil, yang secara langsung menaikkan Rasio Gini. Literatur mengenai keadilan tenaga kerja menekankan bahwa ketidakadilan sosial (IKG tinggi) adalah kendala utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Yuan *et al.*, 2024).

Temuan kontra-intuitif kedua dari Model 3 adalah pengaruh negatif yang signifikan dari Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Rasio Gini ($\beta = -0.914$, $p = 0.017$). Penjelasan yang paling masuk akal adalah fenomena “Kompresi Pendapatan” (Income Compression). Tingkat pengangguran yang tinggi berfungsi sebagai proksi untuk kelesuan ekonomi. Selama periode kontraksi, pendapatan kelompok menengah ke atas (laba usaha, bonus, gaji sektor formal) cenderung turun lebih tajam daripada pendapatan kelompok terbawah. Penurunan yang lebih besar di bagian atas distribusi ini “memadatkan” keseluruhan distribusi pendapatan, yang secara matematis menghasilkan penurunan Rasio Gini (Hacibedel *et al.*, 2023). Dengan demikian, tanda negatif pada variabel pengangguran tidak boleh diinterpretasikan sebagai “pengangguran baik untuk kesetaraan”. Sebaliknya, ini adalah sebuah peringatan metodologis yang krusial: penurunan Rasio Gini tidak selalu mencerminkan hasil pembangunan yang positif, melainkan bisa jadi merupakan gejala dari “pemerataan ke bawah” (*leveling-down*). Secara keseluruhan, temuan-temuan yang divergen, misalnya dampak positif pada luaran sosial (pendidikan, kesehatan) versus dampak negatif pada distribusi ekonomi, secara kuat memvalidasi kegunaan kerangka teoretis multi-level yang terintegrasi. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana struktur patriarki dan institusi informal berfungsi sebagai “faktor konversi” aktif yang memediasi hubungan antara modal manusia dan hasil-hasil pembangunan, menghasilkan kemajuan yang tidak merata dan seringkali paradoks.

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender memiliki dampak yang divergen terhadap dimensi pembangunan di Indonesia selama periode 2020-2024. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terbukti secara signifikan mendorong kesetaraan capaian di sektor pendidikan (peningkatan Gender Parity Index) dan kesehatan (peningkatan Rasio Angka Harapan Hidup). Temuan ini mengonfirmasi peran IPG sebagai ‘faktor konversi positif’ yang memperluas kapabilitas sosial perempuan. Namun, temuan paling krusial adalah terungkapnya ‘Paradoks Pembangunan Gender

Indonesia’, di mana peningkatan IPG yang sama justru secara signifikan memperburuk ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tidak ditemukan berpengaruh signifikan pada ketiga variabel dependen dalam penelitian ini.

Temuan paradoks ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan manusia perempuan di Indonesia tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada kelompok elit terdidik, sesuai dengan ‘Hipotesis Kemajuan Bertingkat’. Sintesis kerangka teoretis penelitian menunjukkan bahwa struktur patriarki dan institusi informal yang mengakar berfungsi sebagai ‘faktor konversi negatif’ yang sistematis. Faktor-faktor ini menghalangi mayoritas perempuan untuk mengonversi peningkatan modal manusia mereka menjadi keuntungan ekonomi yang setara, yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penurunan ketimpangan ekonomi tidak cukup dicapai melalui peningkatan capaian gender semata, tetapi menuntut intervensi kebijakan yang secara spesifik membongkar hambatan struktural dan institusional di pasar tenaga kerja. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data mikro untuk membedah mekanisme transmisi ini di tingkat rumah tangga secara lebih granular.

Referensi

- Abidin, A. Z., Arif, M., & Abroroh, S. A. (2022). Studi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(1), 23–36. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Adika, N. D., & Rahmawati, F. (2021). Analisis indikator ketimpangan gender dan relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Ecoplan*, 4(2), 151–162. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Alotaibi, N. H., Dasuki, S., & Zamani, E. D. (2025). M-government and Saudi women's empowerment: A capability approach perspective. *Information Technology for Development*. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Amalia, L., & Rachmawati, L. (2025). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi kerja perempuan pada sektor formal selama pandemi Covid-19 di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4439–4451. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Aprilianti, S., & Setiadi, Y. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Gender di Indonesia tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, 245–254. [Google Scholar](#)
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian*, 23(1), 1–16. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Assaad, R., Hendy, R., Lassassi, M., & Yassine, C. (2021). The MENA paradox: The surprising decline in female labor force participation in the Middle East and North Africa. *Demographic Research*, 45, 141–184. [Crossref](#)

- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Ketimpangan Gender 2023. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta 2023. BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data* (4th ed.). Wiley. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Belaid, L., Ochola, E., Bayo, P., Alii, G. W., Ogwang, M., Greco, D., & Zarowsky, C. (2021). Exploring the impact of a community participatory intervention on women's capability: A qualitative study in Gulu Northern Uganda. *BMC Women's Health*, 21(28). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Cameron, L. (2023). Gender equality and development: Indonesia in a global context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179–207. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Febriana, N. W. R., & Hailuddin. (2024). Analisis pengaruh kesetaraan gender di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(5), 1034–1044. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Gobay, M. Y., & Sugiyanto, C. (2025). Women empowerment program and women's health: A Papua and Eastern Indonesia case study. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 10(1), 122–139. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Gujarati, D. N. (2011). *Econometrics by example*. Palgrave Macmillan. [Google Scholar](#)
- Hacibedel, N., Karatas, F., & Yilmaz, F. (2023). Economic fluctuations and inequality in developing countries: Unveiling unemployment. *Global Economic Review*, 52(3), 295–314. [Crossref](#)
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Hermawan, A., Mufiedah, M., Madina, V., Santika, Z. M., Kasim, M. F., & Siagian, T. H. (2023). Kesenjangan kondisi pengangguran lulusan SMK/MAK di Indonesia: Analisis antargender dan variabel-variabel yang memengaruhinya. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(3), 245–260. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Hosseinpoor, A. R., Koller, T. S., Indipendenza, F., & Schlottheuber, A. (2023). Is gender equality associated with a smaller or wider gender gap in life expectancy? A global study. *PLOS Global Public Health*, 3(3), e0001214. [Crossref](#)
- Ilkcaracan, I., & Memiş, E. (2021). Transformations in the gender gaps in paid and unpaid work during the COVID-19 pandemic: Findings from Turkey. *Feminist Economics*, 27(1–2), 1–22. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Koenig, L. R., Blum, R. W., Shervington, D., Green, J., Li, M., Tabana, H., & Moreau, C. (2021). Unequal gender norms are related to symptoms of depression among young adolescents: A cross-sectional, cross-cultural study. *Journal of Adolescent Health*, 69(15), S47–S55. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Koto, R., Ridwan, E., & Muharja, F. (2025). Analisis partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7(3), 607–612. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Larashati. (2022). Ketimpangan dan peningkatan kesetaraan gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals). *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 4(2), 55–61. [Google Scholar](#)
- Lestari, D. A., & Susanti, A. I. (2025). Review of the influence of women's empowerment on maternal health outcomes. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 20(3), 192–202. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Menouar, R. (2025). National wealth and gender inequality in entrepreneurship: A paradox in high-income economies. *International Journal of Scientific Research and Innovative Studies*, 4(3), 9–15. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Nath, S., & Das, G. (2024). What determines women empowerment in India? A capability-based approach. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2407026. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Noor, S., Isa, F. M., & Shafiq, A. (2022). Women's entrepreneurial success models: A review of the literature. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 18(1), 137–162. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Nurhidayah, I., & Susilowati, M. (2022). The impact of development and gender empowerment on the condition of income inequality and poverty in Indonesia. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, 3(1), 163–170.
- Pramesty, R. A., Sonawati, S., Adnani, Q. E. S., & Susiarno, H. (2025). Review of the influence of women's empowerment on maternal health outcomes. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 20(3). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
- Ruslin, I. T. (2022). The way of a patriarchal bargain: How the bargain under the structure and agency perspective. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2), 141–153. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Schmidt, M., Strotmann, H., & Volkert, J. (2022). Female and male community-level empowerment: Capability approach-based findings for rural India. *The European Journal of Development Research*, 34, 754–784. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Setyonaluri, D., Nasution, G., Ayunisa, F., Kharistiyanti, A., & Sulistya, F. (2021). *Social norms and women's economic participation in Indonesia*. Lembaga Demografi FEB UI. [Google Scholar](#)
- Siregar, N. A., Ricardo, R., & Nurdianto, N. R. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, sex ratio, dan indeks pembangunan gender terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi, Lingkungan, Energi, dan Bisnis*, 2(1), 43–57. [Google Scholar](#)
- Tope, A. R., Topesugi, A. R., & Topesugi, A. M. (2025). Impact of Gini ratio, economic growth and unemployment on poverty levels: A panel data analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 15(5), 65–72. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. General Assembly.
- Wang, H., et al. (2019). Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. *The Lancet*, 388(10053), 1459–1544. [Google Scholar](#)
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. *Econometrica*, 48(4), 817–838. [Google Scholar](#)
- Wibawa, R., Budiartiningih, R., Kornita, S. E., Maulida, Y., & M., P. N. (2024). The influence of gender inequality on economic growth in Riau Province 2012–2021. In *2nd International Conference on Gender, Culture and Society, KnE Social Sciences* (pp. 381–394). [Crossref](#) | [Google Scholar](#)
- Yuan, H., Choukroune, L., & Failler, P. (2024). Centring justice for labour in the new blue economy: Principles for applying emerging evidence and theoretical critiques to policy and practice. *Marine Policy*, 168, 106327. [Crossref](#) | [Google Scholar](#)